Penerapan Prosedur Audit atas Utang Usaha Uji Pengendalian, Uji Substantif, dan Pengujian Cut-Off

Maulida Afdalia Hamzah[1*], Priskilla Ellen Vionita[2], Nur Aznih[3], Aqilah Zahratun Hariadi[4], Asdar Ali[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Negeri Makassar
[*]E-mail Korespondensi: maulidaafdalia576@gmail.com

Information Article
History Article
Submission: 11-10-2026
Revision: 20-11-2026
Published: 22-11-2026

DOI Article:
10.24905/mlt.v8i1.575

A B S T R A K

Utang usaha merupakan akun kritikal dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran karena risiko utamanya adalah kurang saji (*understatement*), termasuk kewajiban yang tidak dicatat. Artikel ini bertujuan menjelaskan peran uji pengendalian, menguraikan uji substantif dan pengujian *cut-off*, serta merumuskan saran bagi auditor. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif-deskriptif atas buku auditing, Standar Audit yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan lima studi kasus terdahulu di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa uji pengendalian menentukan luas pengujian substantif, bahwa pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat merupakan prosedur yang sangat bernilai karena arah pengujiannya dari dokumen atau pembayaran susulan ke catatan akuntansi, dan bahwa hambatan yang paling sering dilaporkan adalah konfirmasi vendor yang tidak dibalas, sehingga auditor memakai prosedur alternatif seperti pemeriksaan dokumen pendukung dan pembayaran setelah tanggal neraca. Namun, prosedur alternatif tidak selalu dapat menggantikan konfirmasi positif apabila respons diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Karena sumbernya sekunder dan berupa studi kasus, kesimpulan bersifat analitis dan tidak dapat digeneralisasi.

Kata Kunci: Utang Usaha, Prosedur Audit, Uji Pengendalian, Uji Substantif, *Cut-Off*, Utang Tidak Tercatat

A B S T R A C T

Accounts payable is a critical account in the audit of the acquisition and payment cycle because the primary risk is understatement, including unrecorded liabilities. This article aims to explain the role of tests of controls, outline substantive tests and cut-off tests, and formulate recommendations for auditors. The study employs a qualitative-descriptive literature review of auditing textbooks, Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI), and five previous case studies from Indonesia. The findings indicate that tests of controls determine the extent of substantive testing, that cut-off tests and searches for unrecorded liabilities are

Acknowledgment

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

particularly valuable because they trace from source documents or subsequent payments to the accounting records, and that the most frequently reported obstacle is a lack of response to vendor confirmations, which leads auditors to use alternative procedures such as examining supporting documents and payments made after the balance sheet date. However, alternative procedures cannot always replace a positive confirmation when a response is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence. As the study relies on secondary sources and case studies, the conclusions are analytical in nature and cannot be generalized.

Key word: *Accounts Payable, Audit Procedures, Tests Of Controls, Substantive Tests, Cut-Off, Unrecorded Liabilities*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang sudah diterima dalam operasi normal perusahaan. Karena hampir semua transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran akhirnya mengalir melalui akun ini, utang usaha menjadi akun yang kritikal dalam audit siklus tersebut (Arens et al., 2017). Akun ini juga menjadi dasar penilaian likuiditas dan struktur modal, sehingga informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan keputusan manajemen maupun pemangku kepentingan (Salwa et al., 2025). Siklusnya bermula dari permintaan barang atau jasa, berlanjut ke pemesanan, penerimaan, pencatatan utang, dan berakhir pada pembayaran kas. Setiap tahap meninggalkan dokumen yang menjadi jejak audit, yaitu *purchase order*, faktur pemasok, *delivery order*, dan rekening koran, dan pembelian harus diotorisasi pejabat yang berwenang (Susanto & Agha, 2023).

Berbeda dengan piutang usaha yang risiko utamanya adalah *overstatement*, risiko utama utang usaha adalah *understatement*. Manajemen cenderung menyajikan kewajiban lebih rendah, termasuk dengan tidak mencatatnya sama sekali (*unrecorded liabilities*), agar posisi modal kerja dan laba tampak lebih baik. Itu sebabnya audit utang usaha menekankan asersi kelengkapan dan pisah batas (*cut-off*), bukan keberadaan semata. Prosedur khusus untuk risiko ini adalah pencarian utang yang belum dicatat, yang menurut Levy (2017) merupakan prosedur fundamental dan hampir selalu dipakai dalam audit. Prosedur ini lazimnya menguji sampel pembayaran kas setelah tanggal neraca, yakni populasi "berseberangan" tempat utang yang terlewat paling mungkin berada. Satu faktur pembelian akhir tahun yang dicatat pada periode

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

berikutnya sudah cukup membuat kewajiban pada periode yang diaudit tersaji lebih rendah, berikut akun lawannya berupa persediaan atau beban.

Praktik di Indonesia memperlihatkan bahwa prosedur audit atas akun ini tidak selalu berjalan mulus. Benanda dan Mutiha (2024) mengkaji audit utang usaha sebuah perusahaan manufaktur kertas yang saldo per bukunya mencapai USD209.138.054 per 31 Desember 2022, naik 51% dari saldo teraudit tahun sebelumnya. Hambatan yang berulang di berbagai studi adalah konfirmasi yang tidak dibalas. Pada studi Benanda dan Mutiha (2024), tujuh vendor luar negeri tidak membalas, sehingga auditor menguji pembayaran setelah tanggal neraca. Nurfitriani dan Oktapriana (2022) mendapati beberapa vendor belum membalas surat konfirmasi sampai batas waktu, sehingga auditor menempuh prosedur alternatif berupa pengujian pembayaran setelah tanggal neraca. Susanto dan Agha (2023) mencatat dua dari delapan vendor yang dikonfirmasi tidak menanggapi, dan auditor beralih ke pemeriksaan dokumen pendukung. Landasannya adalah Standar Audit (SA) 505 tentang konfirmasi eksternal, yang mengharuskan auditor melakukan prosedur audit alternatif ketika konfirmasi positif tidak dibalas, meskipun prosedur tersebut tidak selalu dapat menggantikan respons yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (Institut Akuntan Publik Indonesia [IAPI], 2021b, Salwa et al., 2025).

Temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan praktis: bagaimana uji pengendalian, uji substantif, dan pengujian *cut-off* seharusnya dirangkai, dan apa yang dilakukan auditor ketika satu prosedur tidak menghasilkan bukti? Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran uji pengendalian, menguraikan rangkaian uji substantif dan pengujian *cut-off*, serta merumuskan saran bagi auditor berdasarkan buku teks, standar audit, dan penelitian terdahulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*literature review*). Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan prosedur audit atas utang usaha, khususnya yang berkaitan dengan uji pengendalian, uji substantif, dan pengujian *cut-off*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku auditing, Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (*IAPI*), serta artikel jurnal yang relevan dengan prosedur audit atas utang usaha. Salah satu sumber teori utama yang digunakan adalah Arens et al. (2017), khususnya mengenai prosedur audit dan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dari berbagai sumber akademik dengan menggunakan kata kunci seperti "prosedur audit utang usaha", "audit accounts payable", "pengujian *cut-off* utang usaha", "*unrecorded liabilities*", dan "*subsequent payment*". Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, yaitu sumber yang membahas prosedur audit atas utang usaha, uji pengendalian, uji substantif, pengujian *cut-off*, konfirmasi utang, serta pencarian kewajiban yang belum dicatat. Selain itu, sumber dipilih apabila memiliki informasi yang cukup untuk mendukung pembahasan dan dapat diakses secara lengkap. Untuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai studi kasus di Indonesia, sumber diprioritaskan pada penelitian yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir agar pembahasan tetap relevan dengan kondisi praktik audit.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Prosedur audit yang ditemukan dalam literatur dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama, yaitu uji pengendalian, uji substantif, dan pengujian *cut-off*. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu dibandingkan dengan konsep dan prosedur audit yang dijelaskan oleh Arens et al. (2017) serta Standar Audit *IAPI*. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara teori, standar audit, dan penerapan prosedur audit atas utang usaha dalam praktik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan prosedur audit yang dapat dilakukan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta mengidentifikasi risiko salah saji, khususnya risiko *understatement* dan utang yang belum dicatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Audit Utang Usaha dan Asersi yang Dituju

Utang usaha merupakan akun yang berkaitan dengan siklus akuisisi dan pembayaran (*acquisition and payment cycle*), karena timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit kepada pemasok. Menurut Arens et al. (2017), audit atas utang usaha dilakukan melalui pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta pengujian saldo utang usaha. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada saldo akhir, tetapi juga pada proses dan pengendalian yang membentuk saldo tersebut.

Dalam audit utang usaha, salah satu risiko utama adalah kewajiban yang tidak dicatat atau *unrecorded liabilities* yang dapat menyebabkan saldo utang dan akun lawannya (persediaan atau beban) menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Salwa et al. (2025)

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

menunjukkan bahwa pemeriksaan utang usaha perlu memperhatikan asersi audit, pemeriksaan dokumen pendukung, konfirmasi pemasok, serta pembayaran setelah tanggal laporan keuangan. Selain itu, Benanda dan Mutiha (2024) menunjukkan pentingnya pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat untuk memastikan kewajiban telah diakui pada periode yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, audit utang usaha terutama berkaitan dengan asersi kelengkapan (*completeness*), keberadaan (*existence*), hak dan kewajiban (*rights and obligations*), akurasi (*accuracy*), serta pisah batas (*cut-off*). Penyajian dan pengungkapan juga relevan, terutama untuk transaksi dengan pihak berelasi. Asersi kelengkapan menjadi penting karena auditor perlu memastikan seluruh kewajiban yang seharusnya dicatat telah masuk dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor perlu menghubungkan penilaian risiko dengan uji pengendalian, uji substantif, dan pengujian *cut-off* dalam memperoleh bukti audit yang memadai.

Uji Pengendalian atas Siklus Akuisisi dan Pembayaran

Uji pengendalian merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan telah dirancang dan berjalan secara efektif. Pada siklus akuisisi dan pembayaran, pengendalian dilakukan sejak proses pemesanan barang atau jasa hingga pembayaran kepada pemasok. Pengendalian tersebut antara lain berupa pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan pemesanan, menerima barang, mencatat utang, dan melakukan pembayaran. Selain itu, setiap transaksi perlu memperoleh otorisasi dari pihak yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang memadai.

Salah satu bentuk pengendalian yang penting adalah pencocokan antara *purchase order* (PO), bukti penerimaan barang, dan faktur pemasok sebelum utang dicatat. Pencocokan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dipesan benar-benar diterima dan jumlah yang ditagihkan sesuai dengan transaksi. Salwa et al. (2025) menunjukkan bahwa pemeriksaan atas pemisahan tugas, otorisasi, kelengkapan dokumen, dan pemeriksaan independen menjadi bagian penting dalam menilai pengendalian utang usaha. Sementara itu, Benanda dan Mutiha (2024) menunjukkan adanya penggunaan dokumen penerimaan barang dan akun *good received/invoice received* (GR/IR) sebagai bagian dari proses pencatatan sebelum utang usaha diakui.

Hasil uji pengendalian selanjutnya digunakan auditor untuk menentukan luas pengujian

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

substantif. Apabila pengendalian dinilai berjalan efektif dan dapat diandalkan, auditor dapat mengurangi luas pengujian substantif tertentu. Sebaliknya, apabila ditemukan kelemahan pengendalian, auditor perlu meningkatkan pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit yang lebih memadai. Salwa et al. (2025) menemukan adanya kelemahan seperti pelunasan yang belum dicatat dan kesalahan input, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut. Dengan demikian, hasil uji pengendalian menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit berikutnya.

Uji Substantif atas Saldo Utang Usaha

Uji substantif dilakukan auditor untuk memperoleh bukti secara langsung mengenai kewajaran saldo utang usaha dan mendeteksi kemungkinan salah saji (IAPI, 2021a). Prosedur ini dapat dilakukan melalui prosedur analitis (IAPI, 2021c) dan pengujian rincian saldo. Prosedur analitis digunakan untuk membandingkan saldo utang dengan periode sebelumnya, menelaah perubahan saldo masing-masing pemasok, serta mengidentifikasi transaksi atau saldo yang tidak biasa. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian rincian untuk memperoleh bukti yang lebih spesifik mengenai saldo utang usaha.

Beberapa prosedur substantif yang umum dilakukan auditor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Prosedur Substantif atas Utang Usaha dan Asersi yang Diuji

Prosedur Audit	Asersi yang Diuji	Tujuan
Rekonsiliasi daftar utang dengan buku besar dan buku pembantu	Kelengkapan, akurasi	Memastikan saldo daftar utang sesuai dengan catatan akuntansi
Konfirmasi saldo kepada vendor	Keberadaan, kelengkapan	Memastikan saldo utang benar-benar ada dan seluruh kewajiban telah dicatat
***Vouching* ke PO, faktur, dan bukti penerimaan**	Keberadaan, akurasi	Memastikan transaksi utang didukung oleh dokumen yang sesuai
Pemeriksaan *subsequent payment*	Kelengkapan, keberadaan	Menelusuri pembayaran setelah tanggal laporan untuk menemukan utang yang belum dicatat
Pemeriksaan dokumen pendukung	Keberadaan, akurasi	Memastikan transaksi dan jumlah utang didukung bukti yang memadai
Pemeriksaan transaksi dengan pihak berelasi	Kelengkapan, penyajian dan pengungkapan	Memastikan transaksi pihak berelasi telah dicatat

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Prosedur Audit	Asersi yang Diuji	Tujuan
		dan diungkapkan secara tepat

Sumber: diolah penulis berdasarkan Arens et al. (2017), IAPI (2021b, 2021d, 2021e), Benanda dan Mutiha (2024), serta Salwa et al. (2025).

Rekonsiliasi daftar utang dengan buku besar dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara rincian saldo pemasok dengan catatan akuntansi perusahaan. Auditor kemudian dapat melakukan konfirmasi kepada vendor untuk memperoleh bukti dari pihak eksternal. Apabila konfirmasi tidak mendapatkan balasan, auditor dapat menggunakan prosedur alternatif (IAPI, 2021b) seperti pemeriksaan *subsequent payment*, yaitu menelusuri pembayaran yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan. Prosedur *vouching* juga dilakukan dengan menelusuri pencatatan utang ke dokumen seperti PO, faktur, dan bukti penerimaan barang. Benanda dan Mutiha (2024) serta Nurfitriani dan Oktapriana (2022) memakai *subsequent payment* ketika vendor tidak membalas konfirmasi. Aditya dan Meita (2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dan *subsequent payment* dapat digunakan untuk memperoleh bukti ketika konfirmasi vendor tidak tersedia, sedangkan Susanto dan Agha (2023) memeriksa dokumen pendukung untuk vendor yang tidak memberikan respons.

Selain itu, auditor perlu memperhatikan transaksi dengan pihak berelasi karena transaksi tersebut dapat memiliki risiko dan karakteristik yang berbeda dari transaksi dengan pihak ketiga (IAPI, 2021d). Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat dokumen transaksi, saldo utang, serta kesesuaian pencatatan dan pengungkapannya. Dengan kombinasi prosedur analitis dan pengujian rincian tersebut, auditor dapat memperoleh bukti yang lebih memadai untuk menilai kewajaran saldo utang usaha.

Pengujian *Cut-off* dan Pencarian Utang yang Belum dicatat.

Pengujian *cut-off* merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dan utang usaha telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Pengujian ini penting karena kesalahan dalam menentukan periode pencatatan dapat menyebabkan saldo utang dan akun lawannya (persediaan atau beban) tidak disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam audit utang usaha, pengujian *cut-off* terutama diarahkan pada transaksi yang terjadi di sekitar tanggal laporan keuangan untuk memastikan bahwa kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal tersebut tidak ditunda pencatatannya ke periode

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

berikutnya. Hal ini berkaitan langsung dengan risiko *understatement* karena utang yang terlambat dicatat dapat menyebabkan kewajiban pada periode berjalan menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Pengujian *cut-off* dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara tanggal penerimaan barang, tanggal faktur, dan tanggal pencatatan utang. Barang atau jasa yang telah diterima sebelum tanggal laporan keuangan pada dasarnya menunjukkan bahwa kewajiban telah timbul dan perlu dipertimbangkan dalam pencatatan periode tersebut. Sebaliknya, penerimaan barang yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan harus dipastikan tidak dicatat sebagai utang pada periode sebelumnya. Dengan demikian, auditor perlu memeriksa transaksi sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang sesuai.

Pemeriksaan penerimaan barang menjadi salah satu prosedur yang penting dalam pengujian tersebut. Auditor dapat menelusuri bukti penerimaan barang yang diterbitkan mendekati akhir periode ke faktur pemasok dan catatan utang usaha. Apabila terdapat bukti bahwa barang telah diterima sebelum tanggal laporan keuangan, tetapi kewajiban baru dicatat setelah tanggal tersebut, auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya salah saji. Pemeriksaan ini juga dapat dikaitkan dengan dokumen *purchase order*, faktur pemasok, dan dokumen penerimaan barang untuk memastikan bahwa transaksi pembelian memiliki dasar yang memadai.

Selain pemeriksaan penerimaan barang, auditor dapat melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan atau *subsequent payment*. Pembayaran setelah tanggal neraca dapat digunakan untuk menelusuri apakah pengeluaran kas tersebut berkaitan dengan kewajiban yang sebenarnya telah ada pada tanggal laporan keuangan. Menurut Arens et al. (2017), pemeriksaan dokumentasi atas pengeluaran kas setelah akhir tahun merupakan salah satu prosedur *out-of-period liability test* untuk menemukan utang yang belum dicatat. Pemeriksaan ini juga berkaitan dengan pertimbangan atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan (IAPI, 2021e).

Pencarian utang yang belum dicatat atau *unrecorded liabilities* merupakan prosedur yang berkaitan erat dengan pengujian *cut-off*. Prosedur ini bertujuan menemukan kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal laporan keuangan tetapi belum masuk dalam catatan akuntansi perusahaan (Levy, 2017). Auditor dapat menelusuri pengeluaran kas setelah tanggal neraca,

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

memeriksa faktur yang masih belum dibayar beberapa minggu setelah akhir periode, menelusuri laporan penerimaan barang sebelum akhir periode ke faktur pemasok, serta memeriksa dokumen atau catatan pemasok. Prosedur tersebut membantu auditor menguji asersi kelengkapan karena arah pemeriksaannya tidak hanya berasal dari catatan akuntansi menuju dokumen, tetapi juga dari dokumen dan transaksi aktual menuju catatan akuntansi (Arens et al., 2017).

Sebagai contoh, perusahaan menerima bahan baku senilai Rp500 juta pada 28 Desember 2025. Namun, faktur dari pemasok baru diterima dan dicatat oleh perusahaan pada 3 Januari 2026. Berdasarkan tanggal penerimaan barang, kewajiban sebenarnya telah timbul sebelum 31 Desember 2025. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa utang sebesar Rp500 juta telah dicatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025. Apabila utang tersebut baru dicatat pada Januari 2026, maka saldo utang usaha per 31 Desember 2025 kurang saji sebesar Rp500 juta, demikian pula akun lawannya, yaitu persediaan bahan baku.

Dengan demikian, pengujian *cut-off* dan pencarian *unrecorded liabilities* merupakan prosedur yang penting dalam audit utang usaha karena secara langsung berkaitan dengan risiko kurang saji. Auditor perlu memastikan bahwa kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal laporan keuangan telah dicatat pada periode yang tepat. Pemeriksaan penerimaan barang, faktur pemasok, dan pembayaran setelah tanggal neraca dapat dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh bukti yang memadai mengenai kelengkapan saldo utang usaha.

Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat bagaimana prosedur audit utang usaha diterapkan dalam praktik. Berdasarkan penelitian yang dikaji, prosedur yang ditemukan meliputi pemeriksaan dokumen pendukung, konfirmasi kepada vendor, pemeriksaan penerimaan barang, pengujian *cut-off*, serta pemeriksaan pembayaran setelah tanggal laporan keuangan. Temuan dari penelitian tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. ***Temuan Penelitian Terdahulu atas Audit Utang Usaha***

No	Penelitian	Objek/Informasi yang Dikaji	Prosedur Audit	Temuan
1	Benanda dan Mutiha (2024)	Perusahaan manufaktur kertas dengan saldo utang usaha per buku	Konfirmasi vendor, *subsequent payment*, dokumen	Pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat tidak menemukan transaksi salah periode maupun

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

No	Penelitian	Objek/Informasi yang Dikaji	Prosedur Audit	Temuan
		USD209.138.054 per 31 Desember 2022	penerimaan barang dan GR/IR, *cut-off*, serta pencarian utang yang belum dicatat	utang yang belum dicatat, tidak diperlukan penyesuaian.
2	Nurfitriani dan Oktapriana (2022)	Audit utang usaha dengan kendala respons konfirmasi vendor	Konfirmasi vendor dan *subsequent payment*	Beberapa vendor belum memberikan respons sehingga auditor menggunakan pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca sebagai prosedur alternatif.
3	Susanto dan Agha (2023)	Audit utang usaha dengan delapan vendor yang dikonfirmasi	Konfirmasi vendor dan pemeriksaan dokumen pendukung	Dua dari delapan vendor tidak memberikan respons sehingga auditor beralih pada pemeriksaan dokumen pendukung.
4	Aditya dan Meita (2024)	Audit utang usaha dengan kendala ketersediaan bukti konfirmasi	Pemeriksaan dokumen dan *subsequent payment*	Pemeriksaan dokumen dan *subsequent payment* dapat digunakan untuk memperoleh bukti ketika konfirmasi vendor tidak tersedia.
5	Salwa et al. (2025)	Pemeriksaan prosedur dan pengendalian atas utang usaha	Pemeriksaan pemisahan tugas, otorisasi, dokumen, konfirmasi pemasok, dan pembayaran setelah tanggal laporan keuangan	Ditemukan kelemahan seperti pelunasan yang belum dicatat dan kesalahan input sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut.

Sumber: diolah penulis berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan dalam *kajian.*

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prosedur audit utang usaha tidak hanya dilakukan dengan memeriksa saldo akhir, tetapi juga dengan memeriksa dokumen dan transaksi yang membentuk saldo tersebut. Benanda dan Mutiha (2024) menunjukkan pentingnya pemeriksaan penerimaan barang, akun GR/IR, serta pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor perlu memastikan bahwa kewajiban yang telah timbul sebelum akhir periode telah dicatat pada periode yang tepat.

Temuan lain yang terlihat adalah adanya kendala dalam memperoleh bukti melalui konfirmasi vendor. Nurfitriani dan Oktapriana (2022) menemukan bahwa beberapa vendor belum memberikan respons terhadap konfirmasi sehingga auditor menggunakan pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca. Susanto dan Agha (2023) juga menunjukkan kondisi yang serupa, yaitu dua dari delapan vendor yang dikonfirmasi tidak memberikan respons sehingga auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa auditor perlu menyiapkan prosedur alternatif ketika bukti dari konfirmasi tidak tersedia.

Aditya dan Meita (2024) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dan *subsequent payment* dapat digunakan ketika konfirmasi vendor tidak tersedia. Sementara itu, Salwa et al. (2025) menunjukkan bahwa audit utang usaha berkaitan dengan pemisahan tugas, otorisasi, kelengkapan dokumen, pemeriksaan independen, konfirmasi pemasok, dan pembayaran setelah tanggal laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menemukan kelemahan berupa pelunasan yang belum dicatat dan kesalahan input yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, terdapat tiga temuan utama. Pertama, pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat menjadi prosedur penting untuk mendeteksi kemungkinan kurang saji utang. Kedua, konfirmasi vendor dapat menghadapi kendala berupa tidak adanya respons sehingga auditor perlu mempertimbangkan prosedur audit alternatif. Ketiga, pemeriksaan *subsequent payment* dan dokumen pendukung menjadi prosedur yang banyak digunakan untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan dan kelengkapan kewajiban.

Analisis Penerapan Prosedur Audit Utang Usaha

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, prosedur audit utang usaha dapat dianalisis dengan membandingkan penerapannya dengan teori Arens et al. (2017) dan Standar Audit

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

IAPI. Perbandingan tersebut diperlukan untuk melihat apakah prosedur yang dilakukan auditor dalam penelitian terdahulu telah sesuai dengan tujuan audit utang usaha, khususnya dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat serta mendeteksi risiko *understatement*] dan *unrecorded liabilities*. Artikel ini menggunakan pendekatan tersebut dengan membandingkan teori, standar audit, dan praktik yang ditemukan dalam penelitian terdahulu.

a. Kesesuaian Prosedur dengan Teori Arens

Menurut Arens et al. (2017), audit utang usaha berkaitan dengan pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan pengujian saldo utang usaha. Salah satu perhatian utama dalam pemeriksaan saldo utang adalah risiko kurang saji sehingga auditor perlu melakukan prosedur yang dapat menemukan kewajiban yang belum dicatat. Prosedur tersebut antara lain pemeriksaan pengeluaran kas setelah tanggal neraca, pemeriksaan dokumen penerimaan barang, penelusuran laporan penerimaan barang ke faktur pemasok, pemeriksaan laporan pemasok, dan konfirmasi vendor.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan tersebut. Benanda dan Mutiha (2024) menunjukkan pentingnya pemeriksaan penerimaan barang, GR/IR, *cut-off*, dan pencarian utang yang belum dicatat. Sementara itu, Nurfitriani dan Oktapriana (2022), serta Aditya dan Meita (2024), menunjukkan penggunaan *subsequent payment* sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh bukti mengenai kewajiban. Dengan demikian, prosedur yang ditemukan dalam penelitian terdahulu pada dasarnya telah mengarah pada tujuan yang dijelaskan dalam teori Arens, yaitu memastikan kelengkapan dan kewajaran saldo utang usaha.

b. **Kesesuaian dengan Standar Audit *IAPI***

Standar Audit (SA) yang diterbitkan IAPI menjadi acuan untuk menilai prosedur tersebut. SA 500 mengharuskan auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (IAPI, 2021a). SA 505 mengatur konfirmasi eksternal, termasuk kewajiban melakukan prosedur audit alternatif apabila konfirmasi positif tidak dibalas, dengan penegasan bahwa prosedur alternatif tidak akan memberikan bukti yang dibutuhkan apabila respons konfirmasi positif memang diperlukan (IAPI, 2021b). Selain itu, SA 520 mengatur prosedur analitis (IAPI, 2021c), SA 550 mengatur transaksi dan saldo dengan pihak berelasi (IAPI, 2021d), dan SA 560 mengatur peristiwa setelah tanggal pelaporan (IAPI, 2021e).

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Penelitian terdahulu pada umumnya sejalan dengan ketentuan tersebut. Benanda dan Mutiha (2024), Nurfitriani dan Oktapriana (2022), Susanto dan Agha (2023), serta Aditya dan Meita (2024) beralih ke prosedur alternatif, yaitu pemeriksaan *subsequent payment* atau dokumen pendukung, ketika konfirmasi vendor tidak tersedia, sebagaimana diminta SA 505. Pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca juga sejalan dengan SA 560, dan penggunaan dokumen pendukung sejalan dengan SA 500 mengenai perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Namun, ringkasan temuan pada Tabel 2 belum menunjukkan apakah respons konfirmasi positif yang tidak diterima memang diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Karena itu, kesesuaian penuh dengan SA 505 belum dapat dipastikan dan perlu ditelaah lebih lanjut pada sumber aslinya.

c. Prosedur yang Paling Sering Digunakan

Berdasarkan Tabel 2, pemeriksaan dokumen, konfirmasi vendor, dan *subsequent payment* masing-masing muncul pada empat dari lima penelitian terdahulu. Pengujian *cut-off* disebut secara eksplisit hanya oleh Benanda dan Mutiha (2024), yang tidak menemukan transaksi salah periode maupun utang yang belum dicatat, tetapi prosedur ini tetap dipandang penting karena Arens et al. (2017) dan Levy (2017) menekankan pencarian utang yang belum dicatat sebagai prosedur utama untuk risiko *understatement*. Penggunaan beberapa prosedur secara bersamaan menunjukkan bahwa pemeriksaan utang usaha tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis bukti.

Pemeriksaan dokumen seperti *purchase order*, faktur, dan bukti penerimaan barang digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan dasar pencatatannya. Konfirmasi vendor memberikan bukti dari pihak eksternal, sedangkan *subsequent payment* memberikan kesempatan kepada auditor untuk menelusuri kewajiban melalui pembayaran yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Pengujian *cut-off* kemudian memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat pada periode yang tepat. Kombinasi prosedur tersebut penting karena risiko utama utang usaha terletak pada kemungkinan kewajiban tidak dicatat atau dicatat pada periode yang salah.

d. Masalah yang Paling Sering Ditemukan

Masalah yang paling terlihat dalam penelitian terdahulu adalah tidak adanya respons dari vendor terhadap konfirmasi. Nurfitriani dan Oktapriana (2022) menemukan adanya vendor yang belum merespons sampai batas waktu, Susanto dan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Agha (2023) menemukan dua dari delapan vendor yang dikonfirmasi tidak memberikan respons, dan Benanda dan Mutiha (2024) mencatat tujuh vendor luar negeri yang belum membalas. Kondisi tersebut menyebabkan auditor perlu menggunakan prosedur lain untuk memperoleh bukti.

Selain masalah konfirmasi, Salwa et al. (2025) menemukan kelemahan berupa pelunasan yang belum dicatat dan kesalahan input. Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko audit tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dapat berasal dari kelemahan proses pencatatan internal perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu menghubungkan hasil pengujian pengendalian dengan pengujian substantif yang dilakukan selanjutnya.

e. Respons Auditor terhadap Kelemahan Prosedur

Apabila konfirmasi vendor tidak mendapatkan respons, auditor perlu melakukan prosedur audit alternatif sesuai dengan kebutuhan bukti dan risiko yang telah dinilai. Pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca, pemeriksaan dokumen penerimaan barang, pemeriksaan faktur, dan penelusuran dokumen pendukung dapat digunakan untuk memperoleh bukti tambahan. Namun, auditor tetap harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. SA 505 (IAPI, 2021b) menegaskan bahwa apabila respons konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, prosedur alternatif tidak selalu dapat menggantikan kebutuhan tersebut.

Apabila ditemukan kelemahan seperti pelunasan yang belum dicatat, kesalahan input, atau transaksi yang tidak sesuai periode, auditor perlu melakukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan dampaknya terhadap saldo utang dan laporan keuangan. Hasil uji pengendalian juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif. Sesuai dengan pendekatan Arens et al. (2017), apabila pengendalian dinilai lemah, auditor perlu meningkatkan pengujian substantif untuk memperoleh bukti yang lebih memadai.

f. Analisis Keseluruhan

Berdasarkan perbandingan antara teori Arens, Standar Audit *IAPI*, dan penelitian terdahulu, penerapan prosedur audit utang usaha pada umumnya telah mengarah pada tujuan yang sama, yaitu memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keberadaan,

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

akurasi, dan *cut-off* saldo utang usaha. Prosedur yang ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti konfirmasi vendor, pemeriksaan dokumen, *subsequent payment*, dan *cut-off* merupakan prosedur yang relevan untuk menghadapi risiko *understatement*.

Namun, penerapan prosedur di lapangan dapat menghadapi kendala, terutama ketika vendor tidak memberikan respons terhadap konfirmasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa auditor perlu memiliki prosedur alternatif dan tidak hanya bergantung pada satu sumber bukti. Pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca dan dokumen penerimaan barang dapat membantu menemukan kewajiban yang belum dicatat. Di sisi lain, auditor tetap perlu menilai apakah bukti alternatif yang diperoleh telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan audit.

Dengan demikian, prosedur yang paling penting dalam audit utang usaha bukan hanya pemeriksaan saldo akhir, tetapi juga prosedur yang dapat mengungkap kewajiban yang belum dicatat dan kesalahan periode pencatatan. Pengujian *cut-off*, pencarian *unrecorded liabilities*, pemeriksaan *subsequent payment*, serta pemeriksaan dokumen pendukung menjadi penting karena prosedur tersebut secara langsung berkaitan dengan risiko kurang saji yang menjadi perhatian utama dalam audit utang usaha.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit atas utang usaha memiliki peran penting dalam memastikan kewajiban perusahaan telah dicatat secara lengkap, tepat, dan sesuai dengan periode terjadinya transaksi. Risiko utama dalam audit utang usaha adalah adanya utang yang belum dicatat atau kesalahan pencatatan periode, sehingga auditor perlu memberikan perhatian lebih pada asersi kelengkapan dan *cut-off*.

Pelaksanaan audit utang usaha dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif, konfirmasi kepada vendor, pemeriksaan dokumen pendukung, vouching, pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca, serta pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konfirmasi vendor tidak selalu memperoleh respons, sehingga auditor dapat melakukan prosedur alternatif seperti pemeriksaan subsequent payment, dokumen penerimaan barang, invoice, dan dokumen pendukung lainnya. Namun, berdasarkan SA 505 (IAPI,2021b), auditor tetap harus mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh, terutama apabila konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai.

Pengujian *cut-off* dan pencarian utang yang belum dicatat menjadi prosedur yang penting karena dapat membantu auditor menemukan kewajiban yang sebenarnya telah timbul sebelum tanggal neraca tetapi baru dicatat pada periode berikutnya. Prosedur seperti pemeriksaan penerimaan barang sebelum akhir periode dan pembayaran kas setelah tanggal neraca dapat memberikan bukti mengenai keberadaan serta kelengkapan utang usaha. Hal ini sejalan dengan pendekatan Arens et al. (2017) yang menekankan pentingnya *search for unrecorded accounts payable* dalam audit kewajiban.

Secara keseluruhan, prosedur audit utang usaha yang dibahas dalam penelitian ini pada umumnya menunjukkan kesesuaian antara konsep audit, standar yang berlaku, dan penerapannya dalam penelitian terdahulu. Namun, karena kajian ini bersumber dari data sekunder dan lima studi kasus, kesimpulan ini bersifat analitis dan belum dapat digeneralisasi. Auditor perlu menyesuaikan sifat, saat, dan luas prosedur berdasarkan risiko serta materialitas akun agar dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dengan penerapan prosedur yang tepat, kemungkinan terjadinya salah saji akibat utang yang tidak tercatat atau salah periode dapat diminimalkan sehingga kewajiban dalam laporan keuangan dapat disajikan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

secara wajar.

Berdasarkan hasil pembahasan, auditor disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengujian kelengkapan dan *cut-off* utang usaha karena risiko utang yang belum dicatat dapat menyebabkan kewajiban dan akun lawannya disajikan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Auditor juga perlu melakukan pemeriksaan secara memadai terhadap dokumen pendukung, penerimaan barang, invoice, serta pembayaran setelah tanggal neraca untuk menemukan kemungkinan adanya utang yang belum dicatat. Dalam pelaksanaan konfirmasi kepada vendor, auditor sebaiknya melakukan tindak lanjut apabila tidak memperoleh respons dan menggunakan prosedur alternatif yang sesuai dengan kondisi serta kecukupan bukti yang diperoleh. Namun, prosedur alternatif tidak selalu dapat menggantikan konfirmasi positif apabila konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak objek atau kasus perusahaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan prosedur audit utang usaha serta permasalahan yang dihadapi auditor dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, B., & Meita, I. (2024). Prosedur audit utang usaha oleh KAP Heliantono & Rekan pada PT SSP dan PT HRR. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, *9*(1), 31-40.

Levy, H. B. (2017). A proper risk-based approach to the search for unrecorded liabilities. *The CPA Journal*, *87*(11), 26-31.

Nurfitriani, I., & Oktapriana, C. (2022). Analisis prosedur audit utang usaha pada PT AKNS oleh KAP Heliantono & Rekan. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, *7*(1), 35-44.

Benanda, K. D., & Mutiha, A. H. (2024). Audit atas utang usaha: Studi kasus pada PT VIN. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *6*(2), 1-16. https://doi.org/10.7454/jsht.v6i2.1116

Salwa, A. A., Amalia, K. P., Elyana, S., Leoni, S., & Merdekawati, E. (2025). Tinjauan penerapan prosedur audit atas utang usaha pada PT XYZ oleh KAP Ramli & Rekan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, *2*(4), 117-136. https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1832

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.

Susanto, N. A., & Agha, R. Z. (2023). Penerapan teknik vouching dalam prosedur alternative confirmation atas audit utang usaha PT SFM oleh KAP NASD. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, *4*(2). https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/1510

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021a). *Standar Audit 500 (Revisi 2021): Bukti audit*. IAPI.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021b). *Standar Audit 505 (Revisi 2021): Konfirmasi eksternal*. IAPI.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021c). *Standar Audit 520 (Revisi 2021): Prosedur analitis*. IAPI.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021d). *Standar Audit 550 (Revisi 2021): Pihak berelasi*. IAPI.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021e). *Standar Audit 560 (Revisi 2021): Peristiwa setelah tanggal pelaporan*. IAPI.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)